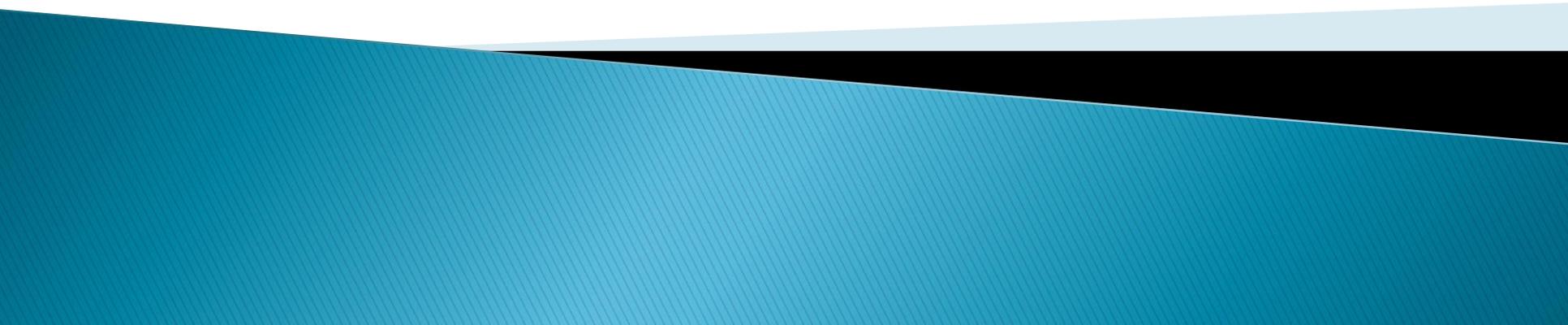


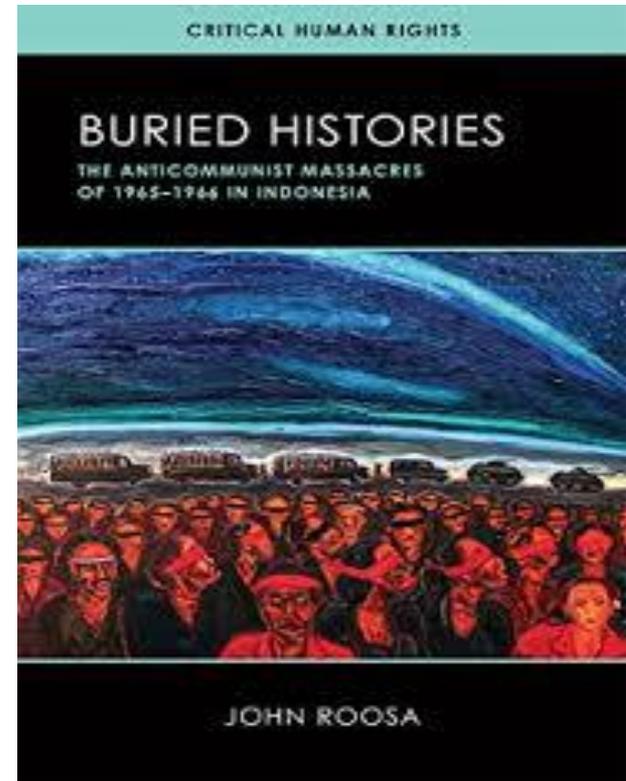
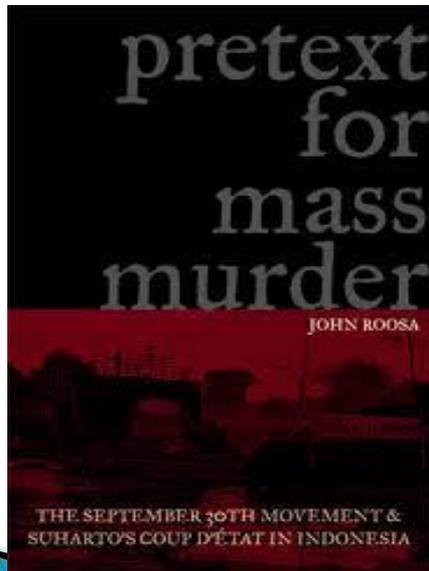
KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM 1965

Asvi Warman Adam



DALANG G30S 1965

- ▶ PKI, Angkatan Darat, Sukarno, Soeharto (kudeta merangkak), Subversi Nekomim.
- ▶ John Roosa 2006, 2020



John Roosa

- ▶ Kekuatan Buku John Roosa
- ▶
 - 1) Sumber yang sah
 - 2) Analisis yang tajam
 - 3) Kesimpulan yang baru



John Roosa (2)

- ▶ Kelemahan utama G30S adalah tidak punya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan yakni kalangan militer (Untung, Latief dan Sudjono) dan pihak Biro Khusus PKI (Sjam, Pono, Bono).
- ▶ Sjam → peran sentral → penghubung antara kedua pihak ini.
- ▶ Tidak didukung Presiden Sukarno bahkan diminta dihentikan, maka kebingungan terjadi.
- ▶ Ini menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dengan berikutnya terdapat selang waktu 5 jam. Suatu kekeliruan besar dalam kudeta.

John Roosa (3)

- ▶ Dokumen Supardjo mengungkap mengapa gerakan itu gagal. Kerancuan antara “penyelamatan Presiden Sukarno” dan “percobaan kudeta” dengan membubarkan kabinet .
- ▶ Jauh sebelumnya, AS mendiskusikan segala cara untuk mendorong PKI bergerak lebih dahulu sehingga dapat dipukul telak oleh Angkatan Darat.
- ▶ Karena sudah tahu sebelumnya, Soeharto adalah jenderal yang paling siap tanggal 1 Oktober 1965.

John Roosa (4)

- ▶ G30S →aksi (culik 7 jenderal dan hadapkan kepada Presiden) bukan sebagai gerakan. Karena aksi sekelompok orang di Jakarta dilakukan secara serampangan maka dapat diberantas satu-dua hari ditambah perlawanan tidak berarti di Jawa Tengah. Namun aksi ini (yang ternyata menewaskan 6 jenderal), oleh Soeharto dijadikan dalih memberantas PKI sampai ke akar-akarnya (yang di lapangan menyebabkan terjadinya pembunuhan massal setengah juta jiwa).

Definisi Korban

- ▶ Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.
- ▶ Fasal 1 ayat 5 UU no 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

TUJUH KATEGORI KORBAN

- ▶ 1) Enam Jenderal
 - ▶ 2) Presiden Sukarno, ditahan di Wisma Yaso 1968–1970 dan tidak dirawat semestinya. Kekuasaannya dicabut perlahan-lahan.
 - ▶ 3) 500.000 terbunuh
 - ▶ 4) Ribuan eksil
 - ▶ 5) Tionghoa ganti nama dan diskriminasi
 - ▶ 6) 11.000 dibuang ke Buru (1969–1979)
 - ▶ 7) Stigma terhadap korban dan keluarga
- 

Tewasnya 6 Jenderal, 3 perwira AD dan seorang polisi



SUKARNO, DITAHAN/DIGULINGKAN BERTAHAP



Terbunuhnya 500.000 orang



Penelitian Siddharth Chandra 2017



The Journal of Asian Studies Vol. 76, No. 4 (November) 2017: 1059–1086.
© The Association for Asian Studies, Inc., 2017 doi:10.1017/S002191181700081X

New Findings on the Indonesian Killings of 1965–66

SIDDHARTH CHANDRA

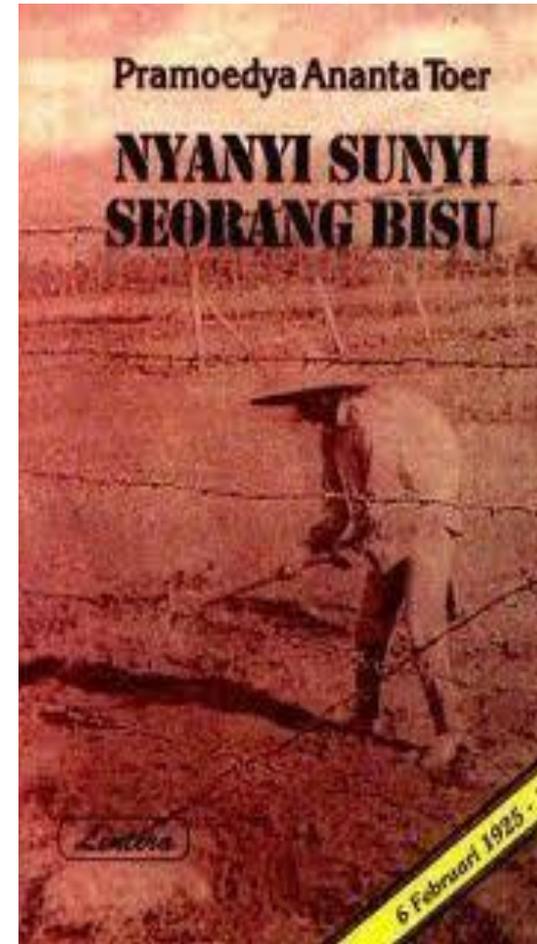
The anti-communist killings of 1965–66 comprised the single most traumatic political event in independent Indonesia, with a consensus estimate of approximately 500,000 deaths. However, these estimates, along with a geographic and political characterization of the killings, have been informed exclusively by anecdotal accounts. In this article, available census data are used in conjunction with demographic analysis to provide a comprehensive and systematic picture of the killings. Using East Java, one of the four hardest-hit Indonesian provinces, as an example, this article estimates and illustrates their impact and provides a geographic characterization of the killings with evidence about the relationship between their locations and local political milieux. While this study is not able to apportion degrees of agency or responsibility for the killings across the various perpetrators, including the Indonesian army and political opponents of the Communist Party of Indonesia, the patterns presented in this article parallel and build on prior research by anthropologists and historians.

Keywords: Communist Party, demography, geography, Indonesia, Nahdlatul Ulama, 1965–66 killings, PKI, population growth, Suharto, Sukarno

Ribuan orang jadi eksil



11.000 dibuang ke pulau Buru



STIGMA TERHADAP KORBAN 1965



TIONGKOK DITUDUH, TIONGHOA JADI KORBAN

China and the Thirtieth of September Movement

Author(s): Taomo Zhou

Source: *Indonesia*, No. 98 (October 2014), pp. 29-58

Published by: [Southeast Asia Program Publications at Cornell University](#)

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.98.0029>

Accessed: 07/02/2015 09:28

CHINA AND THE THIRTIETH OF SEPTEMBER MOVEMENT

Taomo Zhou

Introduction

There has been a lot of uncertainty around the role of the People's Republic of China (PRC) in Indonesian politics immediately before and during the Thirtieth of September Movement (*Gerakan 30 September*, hereafter referred as "G30S"). The idea that Beijing had a hand in G30S has been around since late 1965, when the Indonesian army accused the Chinese government of smuggling arms to the Communist Party of Indonesia (Partai Komunis Indonesia, PKI) for a revolt.¹ The army's newspaper, *Angkatan Bersendjata*, later made a more aggressive charge against G30S as being an "abortive communist coup planned and arranged by the Peking regime as part of its concept of world revolution."² The allegation was instilled in the minds of the general population in Indonesia through the film *The Betrayal of the PKI (Pengkhianatan G30S/PKI)*, a propaganda tool of the Suharto regime that was broadcast annually on

Taomo Zhou is a PhD candidate in the Department of History, Cornell University. Her dissertation focuses on the diplomatic relations and transnational social interactions between China and Indonesia during the Cold War. She thanks Chen Jian, Jack Meng-tat Chia, Sherman Cochran, Charles Kraus, Andrew Mertha, Eric Tagliacozzo, and the anonymous reviewer for their comments, and Jeffery Petersen and Carole Atkinson for their help with materials.

¹ "262 Putjuk Sendjata Dapat Dirampas," *Duta Masyarakat*, October 11, 1965. According to this report, among the 262 pieces of weaponry confiscated in the army's first week of operations against the PKI in the aftermath of G30S, 150 pieces were Tjung rifles.

² "Kisah Gagalanja Coup Gestapu Jang Dimasak di Peking, I: Rezim Peking perintahkan bunuh 7 Djenderal & semua Perwira 'Reaksioner'; RRT sanggupi pengiriman sendjata & perlengkapan untuk 30, 000 orang," *Angkatan Bersendjata*, April 25, 1966.

Pemulihan Korban

- ▶ LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
 - ▶ Walikota Palu
 - ▶ Apakah bisa melalui Palang Merah Indonesia dan/atau Palang Merah Internasional ?
 - ▶ Apakah pemulihan korban itu termasuk pemulihan aset (melalui pengadilan) ?
- 

Pemulihan Aset (1)

- ▶ Rumah Sakirman (yang diperoleh tahun 1963), di Jalan Surapati no 29 Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung.
- ▶ Rumah itu tersebut ditempati oleh Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) kemudian Menwa (Resimen Mahasiswa) Unpad pasca G30S 1965. Perkara itu sudah sampai pada tahap kasasi dan diputuskan Mahkamah Agung tahun 2014 (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).



Pemulihan Aset (2)

- ▶ Perkara hukum yang bersifat individual lainnya adalah kasus Eddy Tanumihardja yang berlarut-larut sampai sekarang. Pada 15 April 1965, Pengadilan Ekonomi Cianjur menjatuhkan hukuman terhadap seorang warga negara asing bernama Tan Eng Hong. Majelis hakim antara lain menjatuhkan putusan berupa perampasan dan penyitaan harta Tan Eng Hong.
- ▶ Ketika eksekusi dilaksanakan, yang mendapat sial adalah Eddy karena kebetulan namanya sama Tan Eng Hong. Saat proses persidangan di Pengadilan Ekonomi Cianjur berlangsung, sebagai anggota DPRGR tengah melawat ke Kamboja, Birma dan Vietnam. Pengadilan merampas dan menyita aset-aset atas nama Tan Eng Hong (alias Eddy Tanumihardja) di Cianjur.

Surat Peninjauan tidak digubris

- ▶ Kabar eksekusi itu sampai juga ke telinga Eddy. Mengingat situasi politik saat itu, atas saran tokoh nasional Idham Chalid, untuk sementara Eddy menunda kepulangan ke Indonesia. Sekembali ke Tanah Air, pada 1969 Eddy mengajukan surat peninjauan atas putusan Pengadilan Ekonomi Cianjur ke Mahkamah Agung, namun tak mendapat respon sama sekali.

Error in persona

- ▶ Pada 10 November 1986, Pengadilan Negeri (PN) Cianjur mengakui adanya kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan (*error in persona*). Penyitaan telah salah karena dilakukan terhadap aset Tan Ang Hing yang WNI. Padahal, semestinya, eksekusi dilakukan terhadap aset Tan Eng Hong yang warga negara asing (WNA). PN Cianjur juga menyatakan Eddy telah menderita kerugian akibat kesalahan itu, dan mewajibkan Pemerintah membayar ganti rugi senilai harga barang yang disita negara.
- ▶ Tahun 1994, PT Sierlando selesai melakukan perhitungan ganti rugi yang harus dibayar kepada Eddy adalah Rp 167 miliar. Namun menurut perhitungan *appraisal* independen Foo, Kon & Tan tahun 2007 jumlah ganti itu mencapai Rp1,4 triliun.



Keppres no 71 tahun 2002

- ▶ Kasus yang menimpa Eddy mendapat perhatian Istana. Presiden Megawati menerbitkan Keppres No. 71 Tahun 2002 yang memutuskan untuk memberikan ganti rugi kepada Eddy dan isteri atas barang-barang yang telah disita negara sebesar nilai harga barang yang telah disita. Keppres ini juga menugaskan Menteri Keuangan untuk mengurus pembayaran ganti rugi tersebut. Selepas terbitnya Keppres, pada 21 Agustus 2003, Menteri Keuangan membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Keppres. Dalam perjalanannya Tim ini tetap belum bisa menentukan besarnya nilai yang harus dibayar negara.